



**INTEGRASI HASIL PENELITIAN SEBAGAI DASAR ADVOKASI STAKEHOLDER
TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***INTEGRATION OF RESEARCH RESULTS AS A BASIS FOR STAKEHOLDER
ADVOCACY ON THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN
THE HEALTH FIELD IN SOUTH KONAWE REGENCY***

Irma

Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*email (irmankedrop15@uho.ac.id)

Abstrak: Rendahnya capaian kinerja daerah berdasarkan 12 indikator SPM bidang kesehatan yang masih rendah menjadi persoalan tersendiri yang harus diselesaikan. Pengabdian ini bertujuan memberikan advokasi kepada stakeholder terkait hambatan dan kendala terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi SPM bidang kesehatan pada 15 puskemas terpilih. Pengadilan menggunakan metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Melalui pemaparan hasil penelitian yang disampaikan oleh tim pengabdian kemudian meminta partisipasi dari tim stakeholder terkait dan kolaborasi dengan pendekatan diskusi kelompok dan tanya jawab. Dari hasil pengabdian ini diperoleh bahwa hambatan dan tantangan dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan Kabupaten Konawe Selatan adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih kurang dan belum terlatih sesuai indikator SPM yang ingin dicapai serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sehubungan dengan temuan stakeholder pemerintah daerah mendukung sepenuhnya sektor terkait yaitu dinas kesehatan dan puskesmas sehingga pemerintah daerah menetapkan rencana tindak lanjut (RTL) untuk merancang dan menyusun peraturan daerah untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan.

Kata Kunci: advokasi; stakeholder; standar, pelayanan, minimal

Abstract: The low level of regional performance based on the 12 SPM indicators in the health sector is a problem in itself that must be resolved. This service aims to provide advocacy to stakeholders regarding barriers and obstacles to the achievement of SPM in the health sector in South Konawe Regency based on the results of research analysis of the implementation of SPM in the health sector at 15 selected community health centers. The court uses participatory and collaborative methods with a group discussion approach. By presenting the research results submitted by the service team, they then asked for participation from the relevant stakeholder team and collaboration using a group discussion and question and answer approach. From the results of this service, it was found that the obstacles and challenges in achieving the SPM targets in the health sector of South Konawe Regency are inadequate facilities and infrastructure, human resources that are still lacking and have not been trained according to the SPM indicators to be achieved and public awareness that is still low. In connection with these findings, regional government stakeholders fully support the relevant sectors, namely the health service and community health centers, so that the regional government establishes a follow-up plan to design and compile regional regulations to support the achievement of MSS in the health sector.

Keywords:advocacy; stakeholder; standard; service; minimum

Article History:

Received	Revised	Published
03 November 2025	10 Januari 2026	15 Januari 2026

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan otonomi atau kewenangan pemerintah daerah. Penyelenggaran urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana ditetapkan dalam SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dan salah satu urusan wajib yang dipersyaratkan oleh SPM adalah bidang kesehatan (Sekretariat Negara RI, 2014). Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal baik secara nasional maupun daerah (Kemenkes RI, 2024).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (SPM-BK) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemenuhan SPM menjadi suatu keharusan untuk kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota (SPMBK) (Kemenkes RI, 2008).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak diterima setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM adalah 100% setiap tahunnya. Jenis layanan kesehatan yang termasuk ke dalam SPM bidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pelayanan kesehatan orang dengan TB, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (Kemenkes RI, 2019).

Pencapaian target SPM bidang kesehatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sasaran yang belum menggunakan data riil, kurangnya SDM pelayanan penderita hipertensi, jumlah sasaran yang tidak sebanding dengan SDM puskesmas, rendahnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pengobatan rutin di fasilitas kesehatan, belum terintegrasi dengan baik jejaring fasilitas kesehatan terkait dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan penderita hipertensi serta kegiatan Posbindu PTM yang belum bisa berjalan secara mandiri tanpa pendampingan Puskesmas (Diana et al., 2023).

Penelitian terdahulu dibeberapa daerah menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian SPM bidang kesehatan yaitu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang maksimal, wilayah demografi yang luas juga berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan, budaya dan kesadaran masyarakat sebagai faktor eksternal, serta manajemen monitoring dan evaluasi yang kurang optimal (Putri et al., 2023; Zudi et al., 2021).

Data tentang implementasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan secara

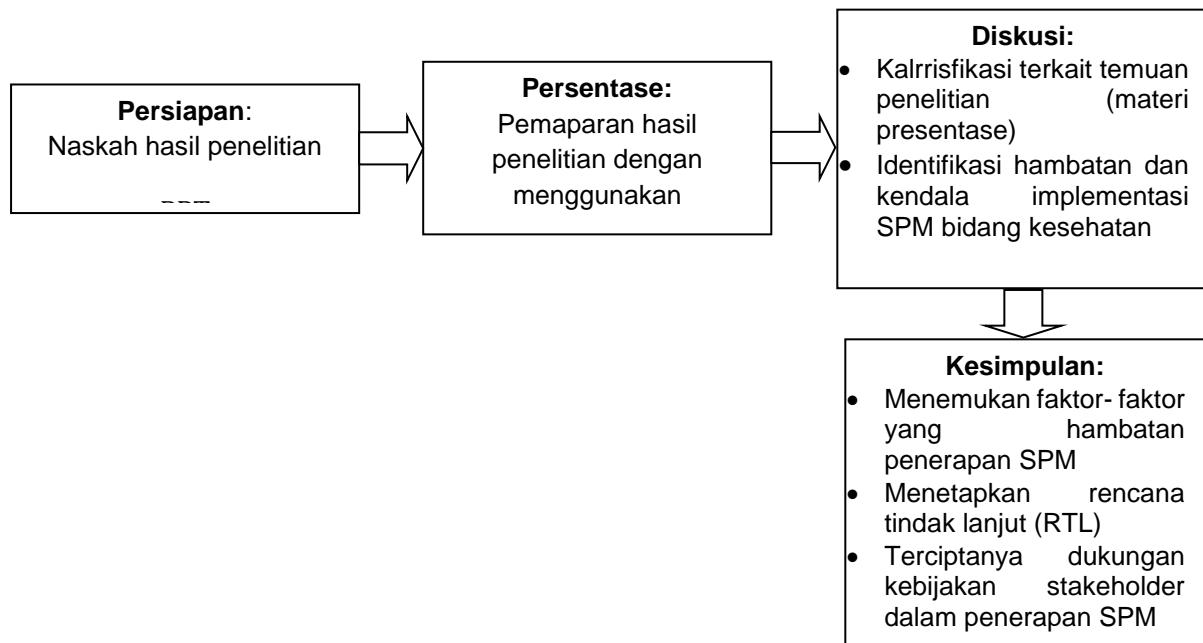
umum belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari 12 indikator SPM bidang kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kementerian kesehatan baru 4 indikator yang mencapai target maksimal (100%) yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, dan Pelayanan Kesehatan dengan orang Tuberculosis (TB) (Dinkes Kab. Konsel, 2023). Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor teknik ataupun faktor non teknik seperti dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan yaitu stakeholder terkait untuk perbaikan implementasi dari SPM bidang kesehatan dan mengidentifikasi kendala dari rendahnya capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian melakukan presentase hasil penelitian terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan dan pihak stake holder berpartisipasi secara aktif dengan memperhatikan dan memberikan pertanyaan atau klarifikasi terkait hasil yang ditemukan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024 di Aula Badan Riset Daerah (Brida) Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di Andoolo sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini diikuti oleh beberapa stake holder terkait yaitu delegasi dari pemerintah daerah yaitu asisten I dan staff ahli bidang kesehatan kabupaten konsel, Kepala Badan Riset Daerah (Brida) Kabupaten Konawe Selatan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Konsel sebanyak 2 orang, delegasi dari 15 Puskesmas yang ada di daerah Kabupaten Konawes Selatan. Secara keseluruhan jumlah peserta dalam kegiatan pengabdian ini sebanyak 20 orang.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Badan Riset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dikikuti oleh delegasi dari berbagai stakeholder terkait. Selengkapnya peserta yang ikut dalam kegiatan “Advokasi Stakeholder Tentang Hambatan dan Tantang Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berbasis Hasil Penelitian di Kabupaten Konawe Selatan ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Peserta Berdasar Unit Stakeholder Tahun 2024

No	Unsur - Unsur Stakeholder	Frekuensi (n)	Percentase (%)
1	Sekretariat Daerah	2	10
2	Dinas Kesehatan	2	10
3	Rumah Sakit	1	5
4	Puskesmas	15	75
Jumlah		20	100

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas (75%) stakeholder terkait adalah pihak puskesmas dan paling sedikit (5%) adalah pihak Rumah Sakit.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan advokasi kepada pihak pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah daerah seperti pihak sekretariat daerah, dinas kesehatan dan puskesmas yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Selatan. Advokasi yang diberikan terkait dengan SPM bidang kesehatan dan hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja daerah dalam bidang kesehatan. Dari hasil presenatase sesuai dengan temuan penelitian dan diskusi dengan pihak puskemas ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan antara lain : target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah merupakan target prediksi bukan target riil, faktor geografis, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas masih terbatas dan sumber daya manusia yang masih kurang. Selain itu beberapa indikator seperti layanan kesehatan usia produktif dan layanan kesehatan jiwa masih jauh dari target yang diharapkan, hal ini karen dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor kesibukan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Keluarga penderita gangguan jiwa terkesan tidak menghirau anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Sesi presentase dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. Presentase Oleh Tim Pengabdian

Advokasi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang diarahkan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari semua jenis institusi. Advokasi menarik perhatian komunitas terhadap masalah penting, dan mengarahkan para pembuat keputusan ke arah solusi. Advokasi menempatkan masalah dalam agenda, memberikan solusi dan dukungan untuk bertindak pada masalah. Advokasi dapat bertujuan untuk mengubah organisasi secara internal atau untuk mengubah seluruh sistem. Advokasi dapat melibatkan banyak spesifik, jangka pendek kegiatan untuk mencapai visi perubahan jangka panjang. Advokasi terdiri dari berbagai strategi yang ditujukan mempengaruhi pengambilan keputusan di organisasi, tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional. Strategi advokasi dapat mencakup lobi, pemasaran informasi, pendidikan dan komunikasi. Advokasi adalah proses orang yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka(Irma and Swaidatul Masluhiya AF, 2021; Suryani D & Yandrizal, 2022).

Setelah sesi presentase oleh tim pengabdian salah beberapa delegasi dari stake holder yaitu Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Konawes Selatan menyampaian bahwa pihak pemerintah daerah mendukung sepenuhnya upaya sektor terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan dalam usahanya untuk mencapai target SPM bidang kesehatan. Bentuk dukungan ini kemudian dituangkan dalam rencana tindak lanjut (RTL). Salah satu RTL yang disepakati dari hasil kegiatan ini adalah pihak pemerintah daerah, melalui sekretariat pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan merancang peraturan daerah yang mendukung program pencapaian SPM bidang kesehatan. Selain itu dari unsur staf ahli pemerintah daerah yang membidangi kesehatan memberikan saran untuk meningkatkan layanan kesehatan jiwa diperlukan satu poli yang berfungsi untuk melakukan skrining kesehatan jiwa bagi orang – orang yang beresiko mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Dalam pencapaian SPM khususnya SPM bidang kesehatan tentu membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, maka diharapkan semua kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dasar bidang kesehatan dapat diatasi. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ideal atau yang mendukung program oleh stakeholder dapat mendukung pencapaian SPM termasuk SPM dalam bidang kesehatan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, (Irma & Kamrin, 2023; Wijaya, 2022). Sesi diskusi dapat dilihat pada gambar 3 berikut :



Gambar 3. Sesi Diskusi/Tanya Jawab dengan Pihak Puskesmas

Dari hasil penelitian dan klarifikasi dari tim pelaksana SPM (dinas kesehatan dan puskesmas) diperoleh dan dipastikan ada beberapa hambatan dalam penerapan SPM bidang kesehatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih terkait dengan indikator SPM misalnya ahli kesehatan jiwa, pihak stakeholder merekomendasikan untuk diadakan pelatihan. Selain itu pihak pemerintah daerah berjanji akan melengkapi sarana dan prasarana

yang dibutuhkan untuk pencapaian SPM bidang kesehatan ini. Hal ini terungkap saat berlangsungnya sesi diskusi dan tanya jawab sebagai feedback dari hambatan dan kendala yang ditemukan. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana salah satu faktor penting yang berhubungan dengan upaya implementasi program SPM bidang kesehatan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya sarana dan prasarana yang memadai menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian SPM bidang kesehatan. Sebaliknya kurangnya SDM yang ada akan menghambat pencapaian SPM bidang kesehatan(Indrawan DC, 2023). Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan bahwa beberapa faktor yang menghambat laju target SPM diantaranya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang maksimal, wilayah demografi yang luas juga berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan, budaya dan kesadaran masyarakat sebagai faktor eksternal, serta manajemen monitoring dan evaluasi yang kurang optimal. Belum tercapainya SPM juga menjadi indikasi bahwa mutu pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas masih terbilang rendah (Ramadhani, S. Sutiningsih, D & Tri Purnami, 2023; Wahyuni, N. & Farida, 2021).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk advokasi dan diskusi kepada stakeholder terkait di Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dan mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam implementasi SPM bidang kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Dari hasil diskusi dengan unsur terkait Dinas Kesehatan dan jajarannya (puskesmas) ditemukan beberapa hambatan antara lain sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang masih kurang untuk menunjang pencapaian target SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu stakeholder dari unsur pemerintah daerah atau delegasi dari sekretariat daerah memberikan respon positif dengan mendukung sepenuhnya upaya pencapaian SPM bidang kesehatan dan merencanakan untuk penyusunan peraturan daerah terkait dengan strategi pencapaian SPM bidang kesehatan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan semua unsur stakeholder terkait yang sudah berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian ini.

Referensi

- Diana, S. S., Jati, S. P., & Fatmasari, E. Y. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tercapainya SPM Kesehatan pada Pelayanan Penderita Hipertensi di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkki.80694>
- Dinkes Kab. Konsel. (2023). *Profil Kesehatan Kabupaten Konaawe Selatan Tahun 2022*. Dinkes Kab. Konsel.
- Indrawan DC. (2023). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan pada Puskesmas Ngagelrejo Di Kota Surabaya dan Faktor Yang Mempengaruhi. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(3), 86–95. <https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1135/831>
- Irma & Kamrin. (2023). Edukasi Pencegahan COVID-19 pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Nambo Kota Kendari. *Meambo*, 2(1), 1–7. <http://jurnal.meambo.nchat.id/>
- Irma and Swaidatul Masluhiya AF. (2021). Pengaruh edukasi perorangan terhadap kesadaran

- masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid - 19 di kota kendari. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(3), 580–587.
- Kemenkes RI. (2008). *Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.* www.hukumonline.com. 1969(1), 1–24. <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/8f86eb1d-40db-42df-a77f-6ebf74872871/>
- Kemenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Kemenkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111713/permenkes-no-4-tahun-2019>
- Kemenkes RI. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2024. *Kementerian Kesehatan*, 31–34.
- Putri, I. H., Jati, S. P., & Martini, M. (2023). Faktor Penghambat Pelaksanaan SPM Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus: Literatur Review. *Malahayati Nursing Journal*, 5(8), 2804–2816. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i8.10974>
- Ramadhani, S. Sutiningsih, D & Tri Purnami, C. (2023). Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Penderita Hipertensi di Puskesmas : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(4), 553–560. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/3209/2670>
- Sekretariat Negara RI. (2014). Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Suryani D & Yandrizal. (2022). *Advokasi Pelayanan Kesehatan*. Literasi Nusantara. https://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/2745/1/Buku_ADVOKASI_PELAYANAN KESEHATAN.pdf
- Wahyuni, N. & Farida, A. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Curug, Kota Serang. *Jurnal JOUBAHS*, 1(2), 179–190. <https://ejournal.ippm-unbaja.ac.id/index.php/adkes/article/view/1501/849>
- Wijaya, N. (2022). Implementasi Kebijakan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Salopa Kabupaten Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 2(4), 189–196.
- Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(2), 165. <https://doi.org/10.31596/jkm.v8i2.681>